

UPAYA MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN BERKOPERASI PADA BINA WILAYAH IV DESA KEBOCORAN, KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KABUPATEN BANYUMAS

Dijan Rahajuni*, Lilis Siti Badriah, dan Nunik Kadarwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding author: dijan.rahajuni11@gmail.com

Diterima 03/02/2022 Direvisi 07/03/2022 Diterbitkan 30/04/2022

Abstract

The eighth main program of the Family Welfare Empowerment Organization (PKK) is the development of cooperative life. However, there are still many PKK organizations and members of the PKK organization who do not understand about Cooperatives, even though Cooperatives are one of the 10 PKK Main Programs as well as a form of business entity in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely as a people's economic movement, which is based on kinship and aims to realize the welfare of members and society. This community service is an effort to develop cooperative life in PKK Bina Wilayah IV Kebocoran Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency. Service activities are carried out through cooperative socialization, funding stimulation and assistance with administrative books, administrative training, and the establishment of Cooperative organizations. The results of service activities achieved from April to November 2021 in the form of the establishment of a pre-cooperative organization as well as the output of service activities. From the pre-cooperative activities at PKK Bina Wilayah IV, there has been an increase in the understanding of PKK Bina Wilayah IV members towards Cooperatives, the participation of members in collecting cooperative funds and the assistance of some members in meeting capital to carry out productive economic businesses. Service implies that efforts to socialize cooperatives are still very much needed sustainably at various levels of society.

Keywords: Financial System, Financial Strengthening Strategy, MSME

Abstrak

Program pokok organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kedelapan adalah pengembangan kehidupan berkoperasi. Namun demikian masih banyak organisasi PKK dan juga anggota organisasi PKK yang belum memahami mengenai koperasi. Pengabdian masyarakat ini merupakan upaya untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi pada PKK Bina Wilayah IV Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi perkoperasian, stimulasi pendanaan dan bantuan administrasi, pelatihan administrasi dan pendirian organisasi koperasi. Hasil kegiatan pendirian organisasi pra koperasi sekaligus sebagai *output* kegiatan pengabdian, terdapatnya peningkatan pemahaman anggota PKK Bina Wilayah IV terhadap koperasi, terjadinya partisipasi anggota dalam penghimpunan dana koperasi serta terbantunya sebagian anggota dalam memenuhi modal untuk melakukan usaha ekonomi produktif. Implikasi pengabdian masih sangat diperlukan upaya memasyarakatkan koperasi secara berkelanjutan

Kata Kunci: PKK, Koperasi, Bina Wilayah IV, Usaha Ekonomi Produktif

A. PENDAHULUAN

Desa Kebocoran merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng, berjarak 1,75 km dari ibu kota Kecamatan. Luas Wilayah Desa Kebocoran 162,54 Ha terbagi dalam 3 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT), dengan kepadatan 3.280 jiwa / Km². Kondisi kependudukan di Desa Kebocoran dilihat dari umur 3.222 (60,26%) jiwa masuk dalam usia produktif dengan tingkat pendidikan tergolong rendah yaitu 80,51 % penduduk usia sekolah baru sempat mengemcam pendidikan sampai dengan sekolah menengah pertama (SLTP). Mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai pedagang kecil (26,62%) dan petani dan atau buruh tani (33,37%) , dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Di Desa Kebocoran terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan di antaranya Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan 10 Program Pokok PKK- nya yaitu : (1) Penghayatan dan pengalaman pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan keterampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan kehidupan berkoperasi ; (9) Kelestarian lingkungan hidup dan (10). Perencanaan sehat, (Majasari Rapih, 2014).

Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa tersusun dari mulai tingkat Desa dikelola oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK), tingkat RW dikelola Bina Wilayah, ditingkat RT dan persepuluh rumah atau Dasa Wisma. Namun demikian dari semua tingkatan organisasi PKK, belum ada satupun yang melaksanakan kegiatan pengembangan kehidupan berkoperasi, padahal koperasi adalah merupakan salah satu program pokok PKK dan juga salah satu bentuk organisasi ekonomi yang direkomendasikan UUD'45 untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kegiatan pengabdian untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi ini akan dilaksanakan pada kelompok Bina Wilayah IV, dimana wilayah Bina Wilayah IV ini berada di dekat pusat pemerintahan Desa Kebocoran, terdiri atas 6 RT dengan jumlah rumah tangga setiap RT rata-rata 40. Adapun luaran kegiatan pengabdian ini berupa produk, yaitu organisasi koperasi.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada organisasi PKK Bina Wilayah IV, selama delapan bulan mulai bulan Maret sampai dengan November 2021 dengan peserta sebanyak 28 orang ibu yang merupakan perwakilan dari pengurus PKK di tingkat RT dalam lingkungan Bina Wilayah IV.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi : (1) Sosialisasi pengenalan dan manfaat organisasi koperasi dalam kehidupan ekonomi di Indonesia; (2) Pemilihan pengurus koperasi; (3) Stimulasi bantuan keuangan dan administrasi pembukuan; (4) Pelatihan pembukuan administrasi koperasi; (5) Pelaksanaan kegiatan koperasi; (6) Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan organisasi PKK didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan suatu organisasi semestinya dilakukan searah dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Sebagaimana pengertian organisasi menurut menurut Sondang P Siagian, 2012 organisasi adalah merupakan kerja sama antara satu orang atau lebih yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi PKK adalah melakukan pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin, untuk mencapai tujuan ini dilakukan melalui 10 Program Pokok

PKK yang dimiliki diantaranya program yang kedelapan yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi.

Namun ternyata dalam organisasi PKK di Desa Kebocoran organisasi PKK dalam kegiatannya belum mengarah sepenuhnya pada upaya pengembangan kehidupan berkoperasi. Berdasarkan hasil pretest terhadap pengurus PKK RT dalam Bina Wilayah IV, menunjukkan 22 orang atau 78 persen pengurus PKK di Bina Wilayah pernah mendengar organisasi koperasi, namun belum memahami bagaimana cara berkoperasi, yang mereka pahami hanya melakukan kegiatan simpan pinjam.

Untuk dapat mewujudkan program pengembangan kehidupan berkoperasi maka diperlukan upaya memberikan pemahaman mengenai koperasi secara benar sebagai mana aturan perkoperasian yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan meliputi kegiatan : (1) Pengenalan dan manfaat organisasi koperasi; (2) Kedudukan koperasi dalam tata ekonomi Indonesia; (3) Syarat dan cara mendirikan organisasi koperasi. Dalam kegiatan sosialisasi ini disepakati membentuk organisasi koperasi pada Bina Wilayah IV, sebagai latihan untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi, oleh karena itu dibentuk organisasi Pra Koperasi PKK Bina Wilayah IV.

Sebagai langkah awal yaitu membentuk susunan kepengurusan organisasi Bina Wilayah IV, yang secara kebetulan di dalam Bina Wilayah IV memang sedang restrukturisasi kepengurusan karena masa kepengurusan telah habis masanya tugasnya. Adapun susunan kepengurusan yang terbentuk, sebagai berikut :

Ketua : Ibu Ketua RW IV
 Sekretaris : Ibu Sunari dan Ibu Eko
 Bendahara : Kas (Ibu Zubaedah)
 Arisan (Ibu Agus Naeni)
 Pra Koperasi (Ibu Isti M)
 Seksi-seksi : Kerohanian (Ibu Siti CH)
 Ekonomi (Ibu Isti M)
 Pendidikan (Ibu Nur W)
 Kesehatan (Ibu Siti W)

Struktur susunan pengurus ini ditambah dengan bendahara yang mengurus kegiatan pra koperasi.



Gambar 1. Perkenalan dan Sosialisasi Perkoperasian

Dalam pra koperasi setelah ada kepengurusan kemudian dibuat kesepakatan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat, meliputi: (1) Iuran pokok sebesar Rp25.000,00; (2) Iuran wajib Rp1.000,00; (3) Iuran suka rela; (4) Jangka waktu pinjaman 10 bulan; (5) Jasa pinjaman 1 persen sebulan; (6) Iuran wajib dan iuran pokok hanya boleh diambil ketika anggota keluar dari pra koperasi; (7) Iuran sukarela bersifat suka rela dan dapat diambil jika membutuhkan, tetapi harus memberitahukan terlebih dahulu sebulan sebelumnya; (8) Untuk sementara pra koperasi hanya melayani anggota, namun tidak menutup kemungkinan jika pra koperasi sudah berkembang dapat pelayanan warga PKK lingkup wilayah RW IV; (9) Untuk menstimulasi modal awal tim pengabdian memberikan bantuan modal sebanyak Rp2.500.000,00; (10) Kas kelompok juga memberikan stimulasi penyertaan modal sebanyak Rp400.000,00. Terbentuknya organisasi pra koperasi dalam diwilayah PKK Bina Wilayah IV ini sekaligus merupakan output dari kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 2. Pemberian Stimulasi Modal Pra Koperasi

Untuk menunjang kelancaran administrasi organisasi PKK Bina Wilayah IV, tim pengabdian memberikan bantuan buku-buku administrasi untuk mencatat setiap kegiatan organisasi. Kegiatan pencatatan bagi organisasi sangat penting, karena dari catatan-catatan sekaligus merupakan arsip yang dapat digunakan sebagai alat pengingat, bukti kegiatan, sarana pengambilan kebijakan (The Liang Gie, 1992)

Setelah pemberian bantuan buku administrasi kelompok kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pencatatan dan pengisian buku-buku administrasi kelompok tersebut kepada para pengurus PKK Bina Wilayah IV. Tujuan diadakannya pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi pra koperasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, Herman Sofyandi, 2013.



Gambar 3. Pemberian Bantuan Buku Administrasi



Gambar 4. Pelatihan administrasi bagi organisasi bagi pengurus PKK Bina wilayah IV Ds. Kebocoran

Aktivitas kegiatan pra koperasi yang dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan bulan November 2021 telah dapat melakukan penghimpunan dana sebanyak: (1) Simpanan

pokok Rp400.000,00; (2) Simpanan wajib Rp170.000,00; (3) Simpanan sukarela Rp150.000,00; (4) Penyertaan modal Rp400.000,00; (5) Stimulasi tim PKM Rp2.500.000,00.

Sehingga jumlah penghimpunan dana terkumpul Rp3.620.000,00. Dengan demikian maka stimulasi dana dari kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana sebanyak 31,51 persen dan atau 44,8 persen dari jumlah stimulasi dana yang diberikan tim pengabdian. Hal ini berarti bahwa respon mitra terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dalam kategori baik.

Dari jumlah dana terkumpul tersebut digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota dengan prioritas anggota yang melakukan usaha ekonomi produktif terlebih dahulu. Sampai dengan November 2021 jumlah anggota yang meminjam sebanyak 12 orang anggota atau 43 persen dari jumlah anggota dengan total jumlah pinjaman Rp3.798.000,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat menyambut baik kegiatan pra koperasi ini, hal ini dimungkinkan karena masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya.

D. PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah masih banyak anggota PKK yang masih belum mengerti secara benar mengenai organisasi koperasi, padahal koperasi merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK, yaitu program kedelapan. Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha sebenarnya sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti untuk modal usaha.

Saran

Dalam upaya mengembangkan kehidupan berkoperasi diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bentuk organisasi masyarakat dan peran serta perguruan tinggi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang telah member kesempatan dan mendanai kegiatan ini pada tahun 2021.

E. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (2017). Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143402/permendagri-no-36-tahun-2020>

Anonim, (2009). Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>

Liang Gie The, (1992). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty

Siagian P. Sondang, (2012). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Sofyandi Herman, (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.